



▶ PEDAGANG MALIOBORO

PKL Ajak Pengusaha Rembuk

DANUREJAN- Polemik penataan PKL di Malioboro terus berlanjut. Setelah Perkumpulan Pengusaha Malioboro (PPM) A. Yani menuntut penataan PKL, kini giliran para PKL mengklaim keberadaan lapak mereka sudah sesuai aturan.

*Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com*

Wakil Ketua Paguyuban Koperasi PKL sisi barat Malioboro Tri Dharma Paul Zulkarnain mengatakan kondisi lapak PKL saat ini sudah sesuai dengan

Para PKL mengklaim lapak mereka sudah sesuai aturan.

Semua tuduhan PPM A. Yani dibantah oleh para PKL.

Perwal Jogja No.37/2010 tentang Penataan PKL Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani. Semua persyaratan, mulai dari panjang, lebar maupun tinggi dagangan diakui dia sudah terpenuhi. "Pada prinsipnya, kami siap duduk bersama kalau memang ada persoalan dengan PKL," katanya, Selasa (4/9).

Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 meter dan yang berada di kanan kiri pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan ketinggian etalase dagangan paling bawah.

Dia mengatakan jumlah anggota Koperasi PKL Tri Dharma ada sekitar 1.300 orang, namun yang berlapak di Malioboro sekitar 800 orang. Mereka membuka lapak di sisi barat depan toko tapi tidak menempel di toko dari utara. "Jadi tidak ada perubahan, apalagi penambahan [jumlah pedagang]," ucap dia.

Tak hanya itu, dia juga membantah adanya isu perdagangan lapak PKL yang dituduhkan oleh PPM A. Yani. Menurut dia PKL tidak ada yang menjual belikan lapak hingga puluhan juta rupiah per lapak.

Sebaliknya yang ada, kata Paul, hanya berupa pengalihan pemilik. Misalnya, dari sebelumnya digunakan oleh ayahnya karena meninggal sekarang digunakan oleh anaknya. "Tidak ada yang diperjualbelikan. Hanya pengalihan kepemilikan karena penggunanya ada usaha di luar daerah. Kami perbarui datanya kemudian kami serahkan ke Pemkot," kata dia.

Senada, Ketua Paguyuban Pelukis, Perajin dan PKL Malioboro-A. Yani (Pemalni) Slamet Santoso mengakui jika banyak komplain dari pemilik toko karena jualan PKL menutup akses masuk toko. "Kalau ada PKL di depan toko yang melanggar melebihi batas, langsung ditegur dan kami potong luasannya sesuai kesepakatan bersama dengan pemilik toko," kata Slamet.

Sebelumnya, Ketua PPMAY Sadana Mulyono menuntut Pemkot segera menata keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro. Para PKL dinilai menggunakan lahan yang ada semauanya sendiri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005